

BAB II

DINAMIKA KONFLIK LAUT CHINA SELATAN

Dalam bab ini penulis akan menyajikan sebuah pembahasan terkait dinamika konflik Laut China Selatan, bagaimana Laut China selatan kemudian mampu mempengaruhi stabilitas regional. Serta penulis juga turut menjabarkan bagaimana eskalasi yang terjadi pada wilayah Laut China Selatan yang dikhususkan tahun 2020-2024. Pertama-tama pada bab ini akan membahas gambaran umum konflik LCS, yang kemudian dilanjutkan dengan peranan ASEAN sebagai organisasi regional dalam menanggapi kompleksitas konflik. Kemudian juga didukung dengan pengaruh klaim sepihak yang dilakukan oleh China terhadap negara anggota ASEAN khususnya dampak pada bidang keamanan dan ekonomi, hal tersebut melihat bagaimana dominasi wilayah LCS bagi pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Tenggara serta sebagai wilayah perairan yang cukup krusial dalam bidang pertahanan dan keamanan.

2.1 Gambaran Umum Konflik Laut China Selatan

Perairan merupakan wilayah yang cukup krusial bagi pertahanan dan keamanan ataupun jalur perdagangan internasional, tidak hanya memiliki kepentingan pada bidang politik dan ekonomi wilayah perairan juga turut menjadi pasokan pangan bagi manusia melihat sumber daya alam baik hayati dan mineral yang melimpah. Berbagai pemanfaatan laut yang dapat dirasakan manusia mampu menjadikan wilayah perairan menjadi esensial, dimana hal tersebut kemudian mendorong penguasaan negara-negara

great power untuk turut mengembangkan kawasan perairan kedalam wilayahudukannya. Melalui konsep *Sea Power* yang telah dikembangkan oleh Mahan dimana suatu negara perlu melakukan penguasaan serta pengamanan pada wilayah perairannya, hal tersebut dikarenakan pada konsep *Sea Power* suatu negara dianggap mampu menguasai dunia jika memiliki tambahan wilayah perairan. Serta, tentunya didukung dengan potensi sumber kekayaan hayati yang mampu dimanfaatkan khususnya untuk perekonomian negaranya.²⁶

Besarnya pengaruh wilayah perairan terhadap bidang pertahanan, ekonomi dan politik, telah mendorong pembentukan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* sebagai bentuk landasan yang mengatur batas wilayah yuridiksi kepemilikan laut. Melalui konvensi yang dilakukan, disebutkan bahwa UNCLOS merupakan landasan yang penting dalam memelihara perdamaian dan keadilan.²⁷ Penjelasan terkait batasan-batasan wilayah perairan telah dijelaskan oleh UNCLOS melalui berbagai aspek antara lain : *Archipelagiz Waters, Territorial Sea, Economic Exclusive Zone, Contiguous Zone, High Sea*.²⁸ Penetapan pada batas-batas wilayah UNCLOS memiliki tujuan berupa sebagai landasan hukum yang jelas bagi suatu negara untuk mengatur sumber daya alam yang dimiliki wilayahnya, UNCLOS juga turut menjadi

²⁶ Sekretariat Nasional ASEAN, *Pilar Politik dan Keamanan ASEAN*, diakses dalam <https://setnasasean.id/pilar-politik-dan-keamanan>, (12/04/2024, 10.00 WIB).

²⁷ Adrian Nugraha, *Dampak Putusan Arbitase Laut China Selatan pada Pengembangan Bersama Minyak dan Gas Bumi*, Jurnal DPR RI.

²⁸ Pangesti Suciningtyas, *The South China Sea Disputes in International Law Prespective*, The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence, Vol 2, No 1 (2021), Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang.

landasan yang penting untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam perairan. Kemudian, yang kedua dengan tujuan menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dimana penetapan batasan wilayah laut dapat digunakan dalam mencegah perselisihan terkait klaim sumber daya laut selain itu negara juga memiliki kebebasan melakukan patroli dan pengawasan dalam mencegah terjadinya kegiatan illegal.²⁹

Sebagai landasan yang mengatur perbatasan-perbatasan wilayah yuridiksi, penggunaan landasan UNCLOS juga memiliki peranan yang cukup penting khususnya pada penyelesaian masalah sengketa pada kawasan Asia-Pasifik.³⁰ Sebagai salah satu kawasan dengan kompleksitas permasalahan keamanan dan politik internasional, perkembangan konflik terus terjadi khususnya pada kawasan Asia Tenggara dengan wujud permasalahan yang masih terus berlanjut hingga saat ini adalah sengketa Laut China Selatan. Laut China Selatan telah menjadi sengketa yang pelik hingga saat ini, sebagai kawasan yang terbilang sudah sejak lama menjadi sumber konflik, sengketa Laut China Selatan turut berpotensi pada terganggunya stabilitas kawasan Asia Tenggara.³¹ Dalam perkembangannya Laut China Selatan telah menjadi sengketa yang

²⁹ Nanik Trihastuti, Peni Susetyorini, Miftah Hanifah, *Penyelesaian Sengketa Gugatan Filipina Terhadap China Mengenai Laut China Selatan Melalui Permanenr Court of Arbitration*, Diponegoro Law Review, Vol 6, No 1, (2017).

³⁰ Marmin, *Punishment of Illegal Fishing Perpetrators in Indonesia in the Prespective of Equality Before the Law*, Diponegoro Law Review, Vol 28, No 2, 2022

³¹ *Ibid*

turut melibatkan China dan negara-negara ASEAN, dimana hal tersebut didasari dengan klaim kepemilikan wilayah yang berlandaskan sejarah ataupun geografis.

Penemuan cadangan minyak pada laut bebas bagian utara Vietnam yang berada dekat dengan kepulauan Sparty telah menjadi titik awal sengketa Laut China Selatan, dimana pada tahun yang sama *U.S Geological Survey* menemukan kandungan cadangan minyak pada kawasan LCS yang mencapai 25 miliar barel.³² Kementerian SDM China turut menyatakan bahwasanya kandungan cadangan minyak bumi yang terdapat pada kawasan Sparty kurang lebih sebanyak 213 miliar barel.³³ Hal tersebut kemudian didukung dengan kekalahan Jepang pada tahun 1946 yang semula menduduki Laut China Selatan dalam *San Fransisco Peace Treaty* menyatakan bahwasanya Jepang telah melepaskan seluruh hak kepemilikannya atas LCS. Kekalahan Jepang kemudian turut menjadi alasan memanasnya hubungan China dan Vietnam yang pada saat itu diduduki oleh Prancis.³⁴ Terjadinya *low level campaign* antara China dan Prancis menunjukkan bahwasanya perebutan wilayah kepulauan Sparty dan Paracel telah terjadi pasca PD II

³² Brian Morton, Graham Blackmore, *South China Sea*, USGS Publication Warehouse, diakses dalam <https://www.usgs.gov/publications/south-china-sea> pada (18/4/2024, 19.30).

³³ Attar Rabbani, *China's Hegemony in The South China Sea*, *The Journal of International Issues*, Vol 23, No 3, (2019).

³⁴ He Xiaheng Derek, *is China Under-Exploiting One Legal Avenue in the South China Sea*, *E-International Relations*, diakses dalam <https://www.e-ir.info/2021/07/17/is-china-under-exploiting-one-legal-avenue-in-the-south-china-sea/> pada (13/4/2024,14.30).

Gambar 2. 1 Peta Klaim Kepemilikan Wilayah Laut China Selatan



Sumber: BBC Indonesia ³⁵

Pada awalnya, China telah menjadi negara pertama yang melakukan klaim wilayah melalui pernyataannya tentang *indisputed sovereignty* yang kemudian diimplementasikan melalui pembuatan peta unilateral dengan nama *Nine Dash Line*.³⁶ Sebagai negara yang cukup gigih dan sensitif dalam mempertahankan wilayah kedaulatannya, China memiliki keyakinan bahwasanya negaranya merupakan pewaris dari dinasti-dinasti sebelumnya. Dimulai dari Dinasi Han pada abad 2 sebelum Masehi

³⁵ BBC Indonesia, *Sengketa Kepemilikan Laut China Selatan*, Diakses Dalam https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/07/110719_spratlyconflict pada (10/04/2024.10.00).

³⁶ Hikmahanto Juwana, *Sembilan GarisPutus Tiongkok*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, diakses dalam <https://law.ui.ac.id/sembilan-garis-putus-tiongkok/> pada (10/4/2024, 15.00)

yang kemudian di lanjutkan hingga Dinasti Qing dan Dinasi Ming yang turut menduduki wilayah LCS pada abad ke 13 sebelum Masehi.³⁷

Klaim wilayah tersebut disusul dengan negara-negara ASEAN antara lain Vietnam yang melakukan klaim berdasarkan letal geografis dan turut menyatakan bahwasanya Vietnam memiliki hak yang sama dengan China atas kepulauan Paracel dan Spartly khususnya pada gugusan utara pulau Paracel yang saat ini dikuasai oleh China, kemudian Malaysia yang turut melakukan klaim pada beberapa pulau Spartly sebagai kawasan yang termasuk pada wilayah landasan kontinennya, disusul dengan klaim Filipina pada tahun 1971 dan Brunei Darussalam yang melakukan klaim wilayah pada tahun 1984 yang dikhususkan pada wilayah perairan sebagai keamanan perairannya serta pengelolaan sumber daya alam dan minyak bumi.³⁸ Klaim wilayah yang dilakukan negara-negara anggota ASEAN juga melihat pada kepentingan ekonomi, pertahanan dan keamanan, dan kebebasan navigasi khususnya bagi kapal dagang, kapal ikan, kapal tanker, kapal patrol dan kapal perang. Kepentingan dalam mempertahankan kebebasan bernavigasi menjadi poin penting melihat wilayah Laut China Selatan yang cukup strategis bagi perdagangan internasional dan keamanan maritim.

³⁷ Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI, *Ketegangan Filipina dan China di Laut China Selatan Serta Upaya ASEAN Dalam Mengatasinya*, Info Singkat Bidang Politik, Hukum, Keamanan Vol 14, No 24 (2023)

³⁸ Yuren Wang, Yitao Tao, *The Effect of Fluctuations in Bilateral Relations on Trade: Evidence From China and ASEAN Countries*, Humanit Soc Sci Commun, Vol 11, No 32 (2024).

Aktivitas klaim kepemilikan yang terbilang tumpang tindih antara negara-negara anggota ASEAN dengan China menjadi titik awal memanasnya sengketa teritorial pada wilayah LCS, dimana China dalam mempertahankan klaimnya berusaha melakukan dominasi baik pada perundingan multilateral ataupun melakukan reklamasi, perebutan area hingga penyerangan kapal negara-negara terkait dengan berbagai alibi serta tidak melakukan klaim berdasarkan landasan UNCLOS, China juga tidak ikut serta dalam proses ratifikasi UNCLOS. Eskalasi konflik yang terjadi pada LCS mengalami peningkatan pada tahun 2012, dimana China melakukan pendirian bangunan permanen pada karang dangkal Scarborough yang terletak sejauh 220 km dari pantai Filipina dan tentu mampu berpotensi mengancam keamanan Filipina.³⁹ Kemudian pada tahun 2014, China melakukan pengeboran minyak His Yang Shi You 981 pada wilayah landas kontinen serta Zona Ekonomi Eksklusif Vietnam.⁴⁰

³⁹ Stephen Burgess, *Confronting China's Maritime Expansion in The South China Sea*, U.S Department of Defense

⁴⁰ Renato Cruz De Castro, *Exploring the Philippines Evolving Grand Strategy in the Face of China's Maritime Expansion: From the Aquino Administration to the Marcos Administration*, *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, Vol 43, No 1 (2024).

Gambar 2. 2 Peta Laut China Selatan



Sumber: NNC Netralnews⁴¹

Secara strategis kawasan Laut China Selatan terletak pada ujung Timur Selat Malaka dan berbatasan langsung dengan negara Brunei, Malaysia, dan Filipina pada sisi Timur, dengan Vietnam pada sisi Barat, Indonesia dan Malaysia pada sisi Selatan, serta China pada sisi Utara.⁴² Sebagai *semi enclosed sea* yang menjadi penghubung jalur perairan Samudra Hindia dan Pasifik, Laut China Selatan telah menjadi perairan yang cukup mendominasi dalam proses perdagangan Internasional baik sebagai *Sea Lane of Trade* atau Jalur Pelayaran Perdagangan dan *Sea Lane of Communication* atau Jalur Komunikasi Internasional. Tidak hanya menjadi lintas perdagangan internasional

⁴¹ NCC Netralnews, *Malaysia Tolak Klaim Peta Baru Laut China Selatan*, Diakses Dalam <https://ncc-frontend.netralnews.com/malaysia-tolak-klaim-peta-baru-laut-china-selatan-oleh-china/VjI5eGw5VFZmaUx0R3RaL3d3bDRzQT09> pada (10/05/2024. 18.00)

⁴² Safrijaldi, *Pelaksanaan Putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) dalam Sengketa Filipina dengan Tiongkok dalam Hal Menciptakan Stabilitas Perdamaian dan Keamanan di Laut China Selatan*, Skripsi, Padang: Hukum, Universitas Andalas. Hal 45.

saja, LCS menjadi kawasan yang memiliki jumlah sumber daya alam cukup tinggi antara lain berupa cadangan minyak yang mencapai 10 miliar *Petroleum* dan 6,7 triliun *Liquified Natural Gas (LNG)* yang merupakan bahan utama pada produksi bahan bakar, serta pada bidang perikanan dimana LCS menjadi salah satu wilayah dengan hasil tangkapan tertinggi didunia.⁴³ Sebagai lautan yang dikenal dengan *Second Persian Gulf* dengan jumlah penghasilan minyak yang mampu melebihi Arab Saudi dan didukung dengan letak geografis yang strategis serta kepentingan politik cukup signifikan menyebabkan potensi konflik antar negara terlibat tidak dapat dihindari. Beberapa negara ASEAN khususnya Filipina telah membawa sengketa LCS kepada Mahkamah Internasional atau *Permanent Court of Arbitration* atas sikap China yang tidak sesuai dengan hukum internasional.⁴⁴ Dalam hal tersebut PCA kemudian mengeluarkan putusan terkait persoalan yang terjadi bahwasanya:

“...The Tribunal concludes that, as between the Philippines and China. China’s claims to historic rights, or other sovereign rights or jurisdiction, with respect to the maritime areas of the South China Sea encompassed by the relevant part of the ‘Nine-dash Line’ are contrary to the Convention and without lawful effect to the extent that they exceed the geographic and substantive limits of China’s maritime entitlements under the convention.”⁴⁵

⁴³ Nazery Khalid, *South China Sea: Platform for Prosperity or Arena for Altercation*, International Journal of Maritime and Fisheries.

⁴⁴ U.S. Energy Information Administration, *Regional Analysis Brief: South China Sea*, EIA, diakses dalam https://www.eia.gov/international/content/analysis/regions_of_interest/South_China_Sea/south_china_sea pada (10/3/2024, 13.30)

⁴⁵ Henk Schulte Nordholt, *What are Beijing Motivations?: The South China Sea Dispute*, Atlantisch Perspectief, Vol 40, No 3 (2016)

Dimana pada pernyataan tersebut PCA menyatakan bahwasanya, klaim China perihal *Historic Rights* melalui *Nine-Dash Line* terbilang tidak sesuai dengan Hukum Laut dan Hukum Internasional. Menanggapi keputusan tersebut, China kemudian mengatakan bahwasanya keputusan yang telah di keluarkan tidak memiliki kekuatan yang mengikat.

“..China will continue to safeguard territorial sovereignty and maritime rights and interests, maintain peace and stability in the South China Sea with parties directly concerned through negotiation and consultation on the basis of respecting historical facts and in accordance with international law”⁴⁶

Pernyataan China akan penolakan putusan mahkamah internasional telah memicu kekhawatiran akan meluasnya permasalahan yang terjadi, hal tersebut didukung dengan adanya provokasi militer yang cenderung mengarah pada terciptanya konflik berskala tinggi.

2.2 Dampak Konflik Laut China Selatan Terhadap Keamanan dan Stabilitas Regional

2.1.1 Dampak Klaim Wilayah China Terhadap Negara Anggota ASEAN

Meluasnya isu keamanan telah menjadi momentum bagi hubungan bilateral yang terjalin antara China dan negara-negara ASEAN, ancaman yang dirasakan kawasan

⁴⁶ Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, *Foreign Ministry Spokesperson Lu Kang’s Remarks on Statement by Spokesperson of US State Department on South China Sea Arbitration Ruling*,
diakse dalam
https://www.mfa.gov.cn/eng/xwfw_665399/s2510_665401/2535_665405/201607/t20160713_696684.html pada (19/4/2024,17.30).

Asia Tenggara bersumbu pada potensi militer dan ekonomi China yang telah menyebar secara agresif pada aspek regional ataupun internasional. Melihat hal tersebut ASEAN sebagai organisasi regional yang menaungi negara-negara terlibat sengketa LCS tidak dapat membuat keputusan sepihak yang tentu mampu berdampak pada hubungan bilateral antara China dan negara-negara anggotanya serta mampu meningkatkan kekhawatiran akan meningkatnya isu ke ranah yang lebih luas. Sebagai negara yang berorientasi menjadi negara maju, China telah menjadikan ASEAN sebagai instrument politik dalam mengejar kepentingan ekonomi serta keamanannya pada kawasan Asia Tenggara.

Keuntungan baik pada bidang ekonomi dan keamanan juga turut dirasakan oleh ASEAN melalui kerjasama yang terjalin. Dimana pada tahun 1990 hingga 2003 pertumbuhan ekonomi pasca terjalinnya hubungan bilateral antara China dan ASEAN mengalami peningkatan ekonomi mencapai 20,8 persen.⁴⁷ Terjadinya peningkatan pada sektor ekonomi kemudian menjadi alasan utama pembentukan *China-ASEAN Free Trade Area* pada tahun 2001. Kemudian dilanjutkan pada 2009, dimana China telah mempertahankan posisinya sebagai mitra dagang ASEAN dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi ASEAN mencapai 507,9 miliar pada tahun 2019.⁴⁸ Ekspor yang dilakukan ASEAN kepada China pertahunnya mengalami

⁴⁷ Susilo, Raden Budi, Mohtar Mas' oed, *Kepentingan Ekonomi dan Politik China Terhadap ASEAN Dalam Konteks ASEAN+3*, Tesis. Yogyakarta: Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, hal. 52.

⁴⁸ Free Trade Agreement Center, *Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia dengan negara ACFTA*, Kementerian Dagang Indonesia, diakses dalam <https://ftacenter.kemendag.go.id/acfta> pada (20/4/2024, 00.03)

peningkatan sebesar 20% pada tahun 2023 . Berdasarkan laporan data ASEAN pada tahun 2023, aliran Investasi asing atau *Foreign Direct Investment* mencapai 9,1 miliar USD.⁴⁹ Hal tersebut kemudian menempatkan posisi China sebagai sumber investasi asing terbesar di ASEAN. Tidak hanya pada bidang ekonomi, dominasi China pada bidang keamanan militer juga turut mempengaruhi Asia Tenggara, interaksi yang dibentuk pada tahun 2001 melalui kerjasama dalam *Transnational nontraditional security threats* khususnya dalam pengiriman obat-obatan terlarang melalui *Beijing Declaration* yang terjalin antara China dengan Thailand, Laos dan Myanmar. Kemudian diikuti dengan penandatanganan *Joint Declaration of ASEAN and China on Cooperation in the field of Non Traditional Security Issues* pada tahun 2003, China juga turut menandatangani *ASEAN Security Protocol* yaitu *The Treaty of Amity and Cooperation* (TAC).⁵⁰ Dengan posisi China yang cukup mendominasi tentu akan menciptakan ketergantungan dan keterikaatan antara China dengan negara-negara Asia Tenggara yang mampu dimanaatkan oleh China, dalam hal tersebut terdapat beberapa dampak sengketa LCS yang mampu mempengaruhi stabilitas regional, antara lain:

⁴⁹ Association of Southeast Asian Nation, *ASEAN-China Economic Relation*, diakses dalam <https://asean.org/our-communities/economic-community/integration-with-global-economy/asean-china-economic-relation/> pada (20/4/2024 00.20)

⁵⁰ ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (ASEAN-IPR), *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*, ASEAN, diakses dalam <https://asean-aipr.org/wp-content/uploads/2018/07/Treaty-of-Amity-and-Cooperation-in-Southeast-Asia-1976-TAC>. Pada (20/4/2024, 10.00)

A. Bidang Ekonomi

Perdagangan internasional, merupakan suatu bentuk perdagangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha dengan tujuan meningkatkan ataupun memperbaiki kesejahteraan negaranya, berkaitan dengan perdagangan internasional atau perdagangan lintas batas selain hubungan yang terjalin antara negara bertetangga atau berdekatan pada jalur darat. Juga terdapat hubungan negara melalui jalur perdagangan perairan antara lain pada kawasan Asia dan Timur Tengah, Eropa hingga Afrika. Terbukanya pintu perdagangan internasional telah menjadikan perairan menjadi prioritas pada jalur dagang yang tentu mampu mempengaruhi ekonomi dunia.

Dampak Perubahan rute pada proses perdagangan internasional dengan tujuan Asia dan Amerika Serikat khususnya pengiriman dari Eropa, Afrika dan Timur Tengah akan mengalami peralihan ke wilayah selatan Australia dan turut menjadi penyebab turunnya aktivitas ekonomi serta peningkatan pada biaya pengiriman.⁵¹ Dalam menghadapi pembekuan pengiriman internasional, perekonomian negara-negara ASEAN juga akan turut mengalami penurunan, hal tersebut dibuktikan dengan penurunan perekonomian Asia Tenggara yang mencapai 20%. Diantaranya berupa Singapura yang mengalami penurunan perekonomian mencapai 20%, Filipina,

⁵¹ Ismah Rustam, *Strategi Maritime Silk Road China dan Dampaknya pada Keamanan Maritim Indonesia*, Indonesian Journal of Peace and Security Studies, Vol 2, No 2, Universitas Mataram, (2020).

Malaysia, Hongkong dan Vietnam yang akan mengalami penurunan ekonomi hingga 15%.⁵²

Dampak ekonomi juga dirasakan oleh negara-negara yang terlibat proses perdagangan internasional antara lain Australia yang turut mengalami penurunan ekonomi sebesar 1.9% hingga 3.1% kemudian Korea dan Jepang yang turut mengalami penurunan ekonomi pada sektor ekspor ataupun impor sebesar 2% hingga 3%. Kemudian, dilanjutkan dengan Arab Saudi yang mengalami penurunan ekonomi sebesar 3% dan Uni Emirat Arab yang mengalami penurunan ekonomi sebesar 5%.⁵³ China sebagai negara yang memiliki pasar domestik dan wilayah pelayaran perdagangan internasional yang cukup besar dibandingkan dengan negara-negara terkait lainnya, hanya akan mengalami kerugian 0,7%.⁵⁴

B. Bidang Keamanan

Tidak hanya pada sektor ekonomi, Sengketa Laut China Selatan juga turut mempengaruhi dinamika militer pada kawasan Asia Tenggara. Sebagai kawasan dengan wilayah perairan yang cukup luas dan kompleks, sektor yang turut terdampak dari terjadinya konflik LCS adalah sektor maritim. Dimana pada sebuah permasalahan keamanan dan stabilitas regional tentu tidak lepas dari kepentingan militer dan peranan

⁵² ASEAN Secretariat, 2023, *ASEAN Statistical Yearbook 2023*, Jakarta: ASEAN Community, hal 258.

⁵³ ASEAN Secretariat, 2023, *ASEAN Statistical Highlight 2022*, Jakarta: ASEAN Community, Hal 10.

⁵⁴ David Uren, *The Economic Toll of the Conflict in South China Sea*, Vision of Humanity, diakses dalam <https://www.visionofhumanity.org/conflict-in-the-south-china-sea-analysing-the-economic-toll/> pada (28/4/2024. 19.55)

masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan keamanan wilayah tersebut.⁵⁵ Keterlibatan aktor dengan *Power* yang cukup besar seperti China dalam ASEAN mampu menjadi evolusi pada prespektif keamanan yang kini turut mengalami perluasan, dominasi China pada bidang ekonomi dan keamanan di kawasan Asia Tenggara tidak mampu mencegah kekhawatiran yang dirasakan negara-negara Asia Tenggara. Dimana ASEAN memandang China sebagai negara yang memiliki *power* lebih besar dan berpotensi pada ketidakstabilan regional.⁵⁶ Eskalasi konflik yang terjadi pada beberapa tahun terakhir telah menjadi saksi bahwasanya LCS telah menjadi subjek manuver China yang kemudian memicu protes bagi negara-negara ASEAN terkait. Melalui provokasi militer yang dilakukan oleh China, mulai dari penetapan pangkalan militer hingga pembentukan pasukan khusus pada kawasan LCS. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dimana China menolak hasil keputusan pengadilan PBB yang kemudian disusul dengan pembangunan pulau-pulau buatan serta menempatkan instalasi militer pada pulau Sparty. Hal tersebut kemudian mendapat respon dari negara-negara non-ASEAN antara lain Amerika Serikat, Australia, India dan Jepang atau biasa dikenal dengan kelompok “Quad” yang merupakan kemitraan diplomatik dalam mendukung dan berkomitmen untuk menjaga stabilitas Indo-Pasifik.⁵⁷ Keterlibatan negara-negara dengan power yang cukup besar jika dibandingkan

⁵⁵ Yuren Wang, Yitao Tao, *The Effect of Fluctuations in Bilateral Relations on Trade: Evidence from China and ASEAN Countries*, Humanities and Social Sciences Communications, Vol 11, No 32 (2024)

⁵⁶ Dewi Fortuna Anwar, *Indonesia and the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*, International Affairs, Vol 96, No 1 (2020).

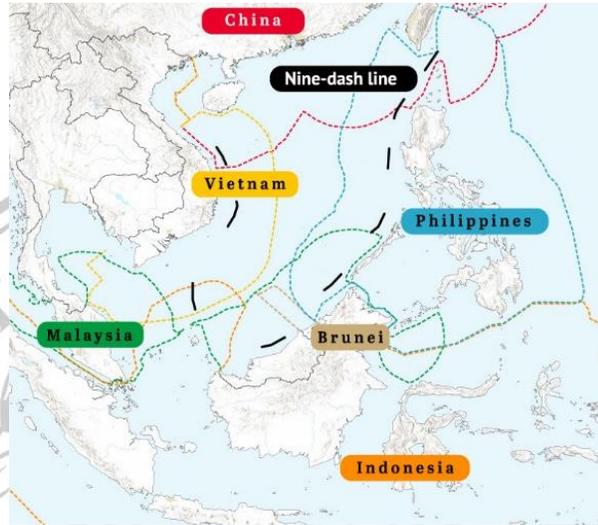
⁵⁷ Saiful Anwar Matandang, Surya Aymanda Nababan, Muhammad Ricky Hardiansyah, *History and Effect of South China Sea Conflict on Southeast Asia Political Stability*, Yupa: Historical Studies Journal, Vol 6, No 1, (2022).

dengan negara-negara ASEAN kemudian mampu meningkatkan kekhawatiran akan stabilitas regional khususnya bagi negara ASEAN yang turut terlibat pada sengketa wilayah di LCS dengan China. Penerapan klaim yuridiksi yang dilakukan oleh China melalui *Nine-Dash Line*, yang merupakan peta territorial dengan sembilan garis putus sebagai titik koordinat yang digunakan oleh China untuk mengklaim 90% wilayah Laut China Selatan, dengan luas 2 juta kilometer dan membentang sejauh 2.000 km dari daratan China hingga memasuki wilayah Filipina, Vietnam dan Malaysia.⁵⁸



⁵⁸ Wangi Sinintya Mangkuto, *Bukan hanya Republik Indonesia, Laut Malaysia sampai dengan Vietnam Juga diklaim China*, CNBC Indonesia, diakses dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200107085224-4-128148/bukan-cuma-ri-laut-malaysia-s-d-vietnam-juga-diklaim-china> pada (3/3/2024, 18.00).

Gambar 2. 3 Peta Nine-Dash Line China



*Sumber: The ASEAN Post*⁵⁹

Sebagai bentuk klaim sepihak yang tidak memiliki dasar hukum internasional, penerapan batasan wilayah tersebut tentu berdampak pada hilangnya wilayah perairan bagi beberapa negara antara lain: Filipina kehilangan 80% wilayah perairan, Vietnam kehilangan 50% wilayah perairan, Malaysia kehilangan 80% wilayah perairan, Indonesia kehilangan 30% wilayah perairan, dan Brunei kehilangan 90% wilayah perairannya.⁶⁰ Kondisi yang terjadi kemudian mampu berdampak pada keamanan nasional pada masing-masing negara terkait. Pengaruh klaim China terhadap wilayah yuridiksinya turut mempengaruhi sektor ekonomi bagi negara anggota ASEAN, dimana pada proses perdagangan internasional melibatkan 80% jalur perairan dengan

⁵⁹ Jason Thomas, *Nine-dash Line Drawing Trouble in Vietnam*, The ASEAN Post, diakses dalam <https://theaseanpost.com/article/nine-dash-line-drawing-trouble-vietnam> pada (18/4/2024.19.00)

⁶⁰ Badan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, 2019, *Connecting the Connectivity in the Indo-pacific: Indian Ocean and Rim Chapter*, Kementerian Luar Negri.

perkiraan volume lintas perdagangan yang terjadi pada LCS mencapai 20% hingga 33%. Keterkaitan masyarakat sipil dan militer dalam merespon konflik yang terjadi dianggap linier dan dapat mempengaruhi hubungan antar negara pada wilayah LCS, dimana dampak pada sektor militer dititik beratkan pada pengawasan wilayah serta penekanan pada alutsista militer untuk mendukung proses kontrol terkait aktivitas pertahanan negara khususnya pada wilayah LCS. Penggunaan konsep *peacekeeping* serta teori diplomasi pertahanan kemudian mampu menjadi landasan dalam pencegahan konflik bersenjata.⁶¹

2.3 Eskalasi Konflik Laut China Selatan pada Tahun 2020-2024

Ketegangan sengketa Laut China Selatan pada empat tahun belakang menjadi saksi bahwa perkembangan konflik yang terjadi tidak hanya mempengaruhi keamanan dan stabilitas regional saja, namun juga turut mengancam stabilitas global. Dimana pada perkembangannya konflik Laut China Selatan semakin mengalami kompleksitas setiap tahunnya, berbagai perselisihan dan permasalahan terkait penangkapan ikan secara illegal dan penetapan titik koordinat secara sepihak hingga provokasi militer yang terus bergejolak.⁶² Pada tahun 2020, saat dunia digemparkan dengan persoalan pandemi Covid-19, Situasi keamanan LCS semakin mengeruh.⁶³ Hal tersebut dilatar belakang

⁶¹ Mohammad Abel Rahman, *Peran Peace Keeping Operation Negara anggota ASEAN dalam Mendukung Misi Perdamaian PBB*, Vol 6, No 3, Jakarta: Universitas pertahanan Indonesia.

⁶² Yulia Rimapradesi, *Sikap Indonesia Terhadap Krisis China dan Amerika Serikat di Laut China Selatan*, Vol 2, No 1, Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues.

⁶³ Amalina Nur Fajrina, et.al. *Studi Geopolitik Laut China Selatan: Data dan Analisis Media Sosial (Geopolitical Studies of the South China Sea: Data and Analysis of Social Media)*, Vol 8, No 2, Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

dengan sikap China yang cenderung melakukan pemaksaan terhadap batasan-batasan wilayah negara terkait, pada bulan April tahun 2020 beberapa momentum telah menjadi saksi akan situasi LCS yang terus memanas. Dimana pada 16 April, China mengusik eksplorasi migas West Capella yang dilakukan pada Zona Ekonomi Eksklusif Malaysia yang turut diklaim oleh China sebagai wilayah kedaulatannya.⁶⁴ Kemudian pada 19 April, China melakukan penamaan pada 80 pulau yang turut diklaim menjadi wilayah kedaulatannya. Disusul dengan memanasnya hubungan Amerika dan China yang didukung dengan latihan militer gabungan antara AS dan Filipina serta pada 29 April. Dimana Amerika Serikat dianggap melakukan pelanggaran melalui kehadiran kapal perang AS di wilayah perairan LCS, sikap AS dianggap China sebagai tindakan provokasi yang kemudian menyebabkan China melakukan penerbangan pesawat bom B-1B di atas perairan Laut Taiwan dan Laut China Selatan. Melalui penjelasan diatas dapat dipahami bahwasanya. Pada tahun 2020, memanasnya konflik LCS didukung dengan campur tangan Amerika Serikat yang melakukan pengiriman armada tempur ke wilayah LCS serta penetapan 3 pangkalan militer Amerika Serikat hingga pembentukan pasukan militer AS dan Filipina. Campur tangan yang dilakukan Amerika Serikat didasari dengan hubungan kerjasama pertahanan antara AS dan Filipina.⁶⁵

⁶⁴ Efie Baadilla, *Klaim Republik Rakyat China atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Vol 26, No 3, SASI.

⁶⁵ Adrianus Revi Dwiguna, *Rialitas Amerika Serikat-Tiongkok di Laut China Selatan dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia*, Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, Vol 2, No 2 (2019).

Sebagai laut *Semi enclosed sea*, Laut China Selatan juga turut menerapkan *freedom of navigation* yang sesuai dengan hukum internasional. Namun pada pelaksanaannya, kebebasan navigasi menjadi alasan China untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat pada wilayah kedudukannya. Kehadiran aktor-aktor luar dari kawasan tampaknya akan terus berlanjut, salah satu hal yang melatar belakangi dimana beberapa negara ASEAN memandang hal ini bermanfaat dalam menjaga stabilitas di LCS. Sikap China yang semena-mena juga turut memunculkan respon beberapa negara dimulai dengan operasi pesawat militer angkatan laut Amerika Serikat pada 2 Februari 2021, Amerika Serikat menyatakan kesanggupannya dalam memenuhi tantangan untuk turut andil dalam menjaga perdamaian dunia. Pada awal bulan Februari, China telah melakukan pengesahan terhadap *Coast Guard Law of the People's Republic of China*.⁶⁶ Merupakan undang-undang penjagaan pantai dengan mengizinkan penggunaan kekuatan militer terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran kedaulatan maritime yang telah di klaim China, melalui penerapan perundang-undangan tersebut China kemudian mulai mengganggu pengeboran minyak Indonesia di laut Natuna Utara yang masih masuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.⁶⁷ Pada tahun 2021, aktivitas militer juga turut mengalami peningkatan dimana kapal selam Angkatan Laut Prancis melakukan pelintasan pada wilayah LCS sebagai bentuk tur Indo-Pasifik.

⁶⁶ Agastia Dharma, *Menghadapi Misili Maritim Tiongkok dan Operasi Daerah Abu-Abu (Grey Zone Operations) Di Laut China Selatan*, Sorotan Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Mata Akademisi Muda Indonesia, Vol 19, No 35, (2020)

⁶⁷ Mallory Shelbourne, *More than Two Dozen Naval F-35s Now Underway in the Western Pacific*, diakses dalam <https://news.usni.org/2022/01/19/more-than-two-dozen-naval-f-35s-now-underway-in-the-western-pacific> pada (24/04/2024 8.37)

Pada bulan Juli 2021, angkatan laut kerajaan Inggris mengerahkan pesawat tempur gabungan F-35B ke wilayah Laut China Selatan.⁶⁸

Pada tahun 2022, meskipun berbagai upaya diplomasi telah dilakukan agresivitas China masih terus terjadi kegiatan konstruksi sepihak yang telah dilakukan China semakin memicu entitas aktor-aktor non penggugat yang aktif di berbagai bidang mulai administratif, militer dan maritim hingga diplomatik. China yang semakin berupaya dalam melakukan reklamasi wilayah melalui perluasan lahan militer dan pelabuhan khususnya pada wilayah kepulauan Spatly dan Paracel. Pada bulan Juli, *China National Offshore Oil Corporation* melakukan eksplorasi minyak dan gas alam pada palung Beibuwan yang bertepatan dengan wilayah Vietnam. China juga turut melakukan militerisasi pada pulau Woody menggunakan sistem radar dan rudal militernya.⁶⁹

Pada tahun 2023, hubungan Filipina dengan China yang terbilang cukup kompleks terus meningkat pasca tahun 2022. Terdapat beberapa insiden antara kapal China dan Filipina di Laut China Selatan yang kembali memicu kekhawatiran pada negara-negara Asia Tenggara. Hal tersebut dilatar belakangi dengan penabrakan yang dilakukan kapal meriam air China kepada kapal Filipina yang berusaha memasuki wilayah Spatly khususnya pada *Second Thomas Shoal* yang turut diklaim oleh China. *Second thomas*

⁶⁸ *Op. Cit*, Hal 15

⁶⁹ Analyst Oceana Zhou, *CNOOC Taps Oil, Gas From China's First Offshore Shale Oil Well*, Diakses melalui <https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/oil/072922-cnooc-taps-oil-gas-from-chinas-first-offshore-shale-oil-well> pada (24/04/2024 08.41)

shoal atau terumbu terendam yang terletak pada kepulauan Spartly merupakan wilayah yang diduduki Filipina pada tahun 1999, Filipina juga turut menaruh pos terdepan pada wilayah STS berupa BRP *Sierra Madre* yang merupakan sebuah kapal angkut angkatan laut Filipina.⁷⁰ Intensitas yang terjadi antara China dengan Filipina terus mengalami peningkatan selama berbulan-bulan, beberapa kapal penjaga pantai China yang memiliki ukuran besar secara terang-terangan menghadang kapal angkatan laut, kapal-kapal nelayan hingga kapal penjaga pantai. China juga menggunakan laser militer dengan tujuan membuat kapal Filipina kehilangan orientasi, China juga secara rutin mengerahkan puluhan kapal penjaga pantai serta perahu milisi pada kepulauan Sparty yang berjarak 1.287 kilometer dari pantai China.⁷¹

Melihat intensitas yang terjadi antara China dan Filipina, telah mendorong pembentukan kerjasama militer antara Amerika Serikat dengan Filipina yang kemudian. Amerika Serikat yang melihat hubungan buruk antara Filipina dengan China menjadi salah satu peluang untuk terus memperkuat dominasinya khususnya dengan Filipina. Melihat dominasi Amerika Serikat yang terus meningkat pada kawasan LCS, semakin memicu sikap agresif China terhadap Filipina. Dimana hal tersebut dapat

⁷⁰ Kathleen Magramo, *Philippines says South China Sea Outpost Resupplied despite Chinese Harassment*, diakses melalui <https://edition.cnn.com/2023/08/22/asia/philippines-brp-sierra-madre-south-china-sea-intl-hnk/index.html> pada (24/04/2024 08.45)

⁷¹ William Gallo, *Dwarfed by China, Philippines Weaponizes info in Sea Standoff*, Diakses Melalui <https://www.voanews.com/a/dwarfed-by-china-philippines-weaponizes-info-in-sea-standoff-7406874.html> pada (24/04/2024 08.48)

dilihat pada beberapa momen dimana China secara terang-terangan melakukan penyerangan kapal Filipina di dekat Scarborough pada 30 April 2024.

Misi gabungan penjaga pantai Filipina dan biro perikanan serta sumber daya perairan yang terdiri dari kapal BPS Datu Bankaw (MMOV-3004), BRP Bagacay (MRRV-4410) telah dikerahkan ke daerah Scarborough Shoal yang masih termasuk kedalam wilayah zona ekonomi eksklusif Filipina dengan tujuan memasok kebutuhan nelayan Filipina. Namun tiga kapal penjaga pantai China dalam sepertiga perjalanan Filipina melakukan penyerangan menggunakan Meriam air yang secara bersamaan kapal China CCG-3105 dan CCG-5303 melakukan perusakan pagar serta bangunan dangkal diatas kapal Bagacay. Insiden tersebut kemudian menjadi titik memanasnya konflik LCS pasca perundingan negosiasi percepatan kode etik. Tidak berhenti disitu, China juga secara terang-terangan berusaha melakukan reklamasi melalui pembangunan pulau buatan di Sabina Shoal yang merupakan sebuah wilayah terumbu karang kosong dengan jarak 75 mil dari pulau palawan.

Dalam merespon sikap China, Filipina kemudian melakukan pengiriman kapal tidak berpenghuni di kawasan Sabina Shoal guna mengetahui aktivitas illegal China. Filipina juga menemukan tumpukan karang mati yang sudah hancur dan dibuang di Escoda Shoal, sikap China yang terbilang menyampingkan kehidupan maritim dengan merusak terumbu karang juga turut mengancam sumber daya hayati pada kawasan tersebut. Sikap waspada yang dirasakan Filipina dan negara-negara sekitar Sabina Shoal terus meningkat. Melihat pada tahun 2010, China juga melakukan reklamasi

skala besar pada kepulauan Spratly serta mengubah wilayah sekitarnya menjadi pulau buatan. Tinjauan terkait aktivitas di Laut China Selatan telah menjadi sorotan dalam beberapa dekade ini, kegelisahan negara-negara kawasan hingga non kawasan yang turut terlibat pada sengketa yang terjadi akan sikap China yang cukup agresif dan terbilang memaksa. Pentingnya peranan ASEAN sebagai organisasi regional serta fasilitator utama dialog antar negara-negara Asia Tenggara dan China sebagai bentuk upaya dalam meredakan ketegangan yang terjadi dan upaya dalam menjaga stabilitas regional wilayahnya.⁷² Meskipun ASEAN tidak terlibat secara langsung pada sengketa LCS, sebagai organisasi kawasan ASEAN memiliki peran penting dalam membantu mengelola konflik serta mengimplementasikan norma-norma perilaku yang mengikat terhadap seluruh pihak terkait.

2.2 Peranan ASEAN Sebagai Organisasi Regional dalam Menanggapi Kompleksitas Konflik

2.2.1 Peranan ASEAN dalam Sengketa Laut China

Berakhirnya perang dunia telah menjadi titik awal terjadinya sengketa Laut China Selatan, permasalahan territorial yang hingga saat ini masih menjadi topik perdebatan menyebabkan hubungan regional yang terjalin menjadi tidak kondusif.⁷³ Seperti yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, Laut China Selatan merupakan

⁷² I Gede Made, *Kepentingan Vietnam dalam Konflik Laut China Selatan*, Vol 10, No 2, Bali: Universitas Udayana.

⁷³ Agence France, *Why is a Rusty old Philippine warship Involved in the South China Sea Disputes?*, Diakses melalui <https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3230347/why-rusty-old-philippine-warship-involved-south-china-sea-dispute> pada (24/04/10.00)

wilayah yang kaya akan sumber daya alam khususnya pada minyak dan gas. Hal tersebut kemudian yang menjadi alasan utama terjadinya perebutan wilayah dengan empat negara penggugat utama adalah Vietnam, Filipina, Brunei dan Malaysia yang merupakan negara-negara anggota ASEAN, dengan negara penguat lainnya adalah China.⁷⁴ China Sebagai negara yang terbilang cukup membahayakan kawasan regional ASEAN turut melakukan tuntutan akan kepemilikan wilayahnya terhadap negara-negara ASEAN. Pada sub bab ini, bertujuan untuk menganalisis posisi ASEAN sebagai organisasi regional terhadap sengketa maritime Laut China Selatan.

2.2.2 Proses penyelesaian sengketa melalui organisasi regional ASEAN

Laut China Selatan sebagai konflik yang mengarah pada perselisihan territorial hingga sengketa maritime, turut melibatkan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik. Terjadinya klaim sepihak, eksploitasi sumber daya alam dan pembangunan pulau buatan turut menjadi penyebab memanasnya sengketa yang terjadi. Eskalasi konflik yang terjadi kemudian memunculkan kekhawatiran akan meluasnya konflik menjadi konflik terbuka, dalam hal ini konflik LCS sendiri telah memunculkan ketegangan baik pada bidang militer, politik dan diplomatik. Berbagai upaya telah dilakukan oleh ASEAN sebagai organisasi regional yang menaungi kawasan Asia Tenggara. Dalam hal ini, seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, keterbatasan ASEAN untuk terlibat secara langsung menyebabkan beberapa upaya yang dirumuskan oleh

⁷⁴ Leticia Simoes, *The Role of ASEAN in the South China Sea Disputes*, Diakses melalui <https://www.e-ir.info/2022/06/23/the-role-of-asean-in-the-south-china-sea-disputes/> pada (24/04/2024 10.10)

ASEAN tidak dapat berjalan dengan maksimal.⁷⁵ ASEAN kemudian berupaya menjaga stabilitas kawasannya melalui pendekatan diplomasi, dialog hingga perundingan yang turut melibatkan negara-negara ASEAN dengan China.

Melalui pertemuan negara-negara anggota, ASEAN kemudian menandatangani *Declaration on the Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN)* pada tahun 1971.⁷⁶ Pembentukan ZOPFAN merupakan bentuk perwujudan sikap ASEAN yang tidak menerima keterlibatan negara-negara non-ASEAN antara lain seperti Amerika Serikat, Jepang, Uni Soviet dan RRC. Kemudian pada tahun 2011, ASEAN juga turut melakukan penerapan kode etik atau *Code of Conduct* sebagai bentuk pencegahan terjadinya konflik terbuka. COC sendiri merupakan landasan yang mampu mengatur perilaku negara-negara terlibat dalam sengketa LCS, dimana pada CoC menyatakan bahwa seluruh aktor terlibat wajib menyelesaikan konflik atau sengketa secara damai dan tidak mengancam stabilitas dunia.⁷⁷

Selain sebagai bentuk penyelesaian konflik CoC juga diharapkan mampu mengembangkan kerja sama yang terjalin di Laut China Selatan, baik antar sesama negara anggota ASEAN ataupun Non ASEAN. Melalui *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea*, ASEAN kemudian melakukan penerapan peraturan

⁷⁵ Arfin Sudirman, *Regional Security Complex in ASEAN: Neutrality and Centrality at Brink in the South China Sea Issue*, Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities.

⁷⁶ Laura Southgate, *ASEAN: Still the zone of peace, Freedom and Neutrality?*, Vol 73, No 1, Routledge Political Science.

⁷⁷ Imam Wahyudi, *Implementasi Declaration of Conduct oleh ASEAN Terkait Sengketa Laut China Selatan*, Journal Ilmu Hubungan Internasional, Vol 6, No 2 (2016).

yang dikhususkan untuk pemerintah negara-negara Asia Tenggara terkait perjanjian multilateral.⁷⁸ ASEAN juga turut melakukan optimalisasi perannya sebagai forum regional. Sebagai kasus yang cukup krusial, dapat dilihat melalui China yang hingga saat ini masih terus memperkuat bidang militernya melalui latihan angkatan laut di kawasan LCS. Melalui *ASEAN Regional Forum* yang merupakan forum dialog terkait isu-isu politik dan keamanan di kawasan Asia-Pasifik, ASEAN terus berusaha dalam merumuskan upaya dalam penyelesaian sengketa LCS. Hal tersebut juga dilatar belakangi dengan prinsip *Non-Interference* yang turut memperkeruh dinamika sengketa LCS.

Dalam upaya menjaga stabilitas regionalnya ASEAN turut menunjukkan komitmen melalui pembentukan Piagam ASEAN, dimana pada penyusunannya piagam ASEAN menyerukan bagaimana proses mekanisme penyelesaian konflik aktor-aktor didalamnya yang diwajibkan untuk melakukan mediasi, konsiliasi, dan ASEAN sebagai fasilitator penyelesaian konflik yang terjadi. Pada proses penyelesaian sengketa oleh ASEAN terbagi menjadi dua yang pertama, jika sebuah sengketa terjadi dan berkaitan dengan instrument-instrumen ASEAN maka penyelesaian sengketa dapat menggunakan mekanisme ataupun prosedur tertentu. Namun, jika sebuah sengketa terjadi dan tidak sejalan dengan interpretasi nilai-nilai ASEAN, maka dalam proses mekanisme konflik dapat melalui jalur damai berdasarkan *Treaty of Amity and*

⁷⁸ *Ibid*, Hal 7

Cooperation.⁷⁹ Dalam implementasi TAC terdapat tiga mekanisme penyelesaian konflik ASEAN, antara lain: Pencegahan perluasan sengketa, Penyelesaian melalui negoisasi dan penyelesaian sengketa melalui *high council*. Dalam implementasinya *Treaty of Amiy and Cooperation* menggunakan konsep penyelesaian konflik PBB yang telah diatur pada hukum internasional berdasarkan *Preventive Diplomacy*.⁸⁰

Berdasarkan pemaparan diatas, eskalasi hingga dinamika konflik yang masih terus terjadi tidak dapat dihindari khususnya bagi negara-negara anggota ASEAN. Hal tersebut dibutuhkan upaya-upaya ataupun strategi dalam mencegah eskalasi konflik yang terjadi menjadi lebih luas khususnya hingga ranah militer. Perlunya konsep yang selaras dengan prinsip ASEAN, melihat ASEAN merupakan sebuah organisasi yang menerapkan prinsip non-intervensi tentu menjadi tumpang tindih dengan peranan ASEAN yang cukup dibutuhkan sebagai fasilitator forum. ASEAN kemudian, mengembangkan prinsip Preventive Diplomacy yang kemudian dianggap mampu dalam mencegah meluasnya konflik LCS, melihat prinsip Preventive Diplomacy berdasarkan ARF yang cukup linier dengan prinsip-prinsip ASEAN.

⁷⁹ Simon Sheldon, *Conflict and Diplomacy in the South China Sea*, Vol 52, No 6, University of California Press.

⁸⁰ Kei Koga, 2022, *Managing Great Power Politics 1990-2020*. In: *Managing Great Power Politics*, Singapore: Global Political Transitions.